



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

FENOMENA GANGGUAN KESEHATAN MENTAL DALAM DUNIA KERJA

Efendi

Analisis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan mental merupakan kondisi sejahtera seseorang, ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya mengelola stres yang dimiliki, mampu bekerja secara produktif, dan berkontribusi untuk lingkungannya. Pada kondisi tertentu, kesehatan mental dapat mengalami gangguan, seperti gangguan emosional/perilaku, daya ingat/konsentrasi, dan kemampuan mengurus diri. Gangguan kesehatan mental dapat menimpa siapa saja termasuk pekerja. Pada pekerja, gangguan mental dapat mendatangkan dampak serius, seperti penurunan produktivitas.

Tahun 2017, gangguan kesehatan mental banyak menimpa pekerja kelas bawah yang mencapai 66,7% dari total pekerja yang terkena gangguan. Lima tahun kemudian fenomena berubah, pekerja kelas menengah justru yang paling banyak mengalami gangguan kesehatan mental, yaitu sebesar 49%. Tingginya gangguan kesehatan mental pada pekerja kelas menengah disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama* maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa pekerja kelas menengah sehingga pekerja menjadi merasa terancam dan tidak dapat bekerja dengan tenang. *Kedua*, minimnya perhatian pemerintah terhadap kelompok ini. Pekerja kelas menengah dibebani dengan berbagai rencana iuran wajib, seperti tabungan perumahan rakyat (Tapera). Mereka juga kurang mendapatkan bantuan atau insentif fiskal jika dibandingkan dengan pekerja kelas bawah.

Gangguan kesehatan mental juga dialami wirausaha perorangan atau rumah tangga. Golongan ini lebih banyak mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan jenis usaha lain. Sebanyak 88% atau 589.619 wirausaha mengaku memiliki gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku hingga ketidakpastian usaha.

Sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan ini, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memulai program pelayanan kesehatan mental bagi pekerja perkantoran secara promotif dan preventif. Upaya promotif kesehatan jiwa di tempat kerja dilakukan melalui program Pertolongan Pertama Pada Luka Psikologis (P3LP). Program ini memberikan dukungan psikologis sederhana untuk seseorang yang mengalami kejadian berat dan menyebabkan luka psikologis.

Pemerintah juga telah menyediakan berbagai layanan kesehatan untuk masyarakat dengan keluhan gangguan kesehatan mental. Salah satu contohnya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Layanan itu mencakup konsultasi hingga akses pada obat-obatan yang diperlukan. Peserta yang ingin mengakses layanan kesehatan dapat berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Apabila peserta perlu penanganan dokter spesialis, peserta akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Meskipun demikian, layanan kesehatan untuk masyarakat dengan gangguan kesehatan mental mengalami kendala terkait keberadaan psikolog yang terkonsentrasi di perkotaan. Hal ini dapat

dilihat pada data Kemenkes dalam Profil Kesehatan Indonesia 2022. Dalam profil tersebut, tercatat jumlah psikolog klinis di fasilitas kesehatan baru mencapai 1.247 orang. Sebaran tenaga psikolog terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 163 orang; DKI Jakarta sebanyak 141 orang; dan Jawa Timur sebanyak 139 orang. Sementara itu, jumlah psikolog terkecil berada di Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara, dengan jumlah masing-masing daerah sebanyak 3 (tiga) orang. Bahkan, di Gorontalo tercatat tidak ada psikolog. Jumlah psikolog ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia, yang mana satu psikolog di Indonesia berbanding dengan 221.000 orang.

Atensi DPR

Maraknya gangguan kesehatan mental di dunia kerja terutama terhadap pekerja kelas menengah dan wirausaha perorangan perlu menjadi perhatian. Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengawasi dan mendorong pemerintah untuk memberi perhatian pada pelaksanaan kebijakan penanggulangan pekerja yang mengalami PHK;
2. Mendorong pemerintah mengupayakan berbagai program, insentif dan bantuan bagi pekerja kelas menengah;
3. Mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan mental khususnya bagi pekerja kelas menengah dan wirausaha perorangan; serta
4. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan jumlah dan sebaran tenaga psikolog ke berbagai daerah di Indonesia

Sumber

Kompas, 12 & 13 Agustus 2024;
kompas.com, 23 April 2022;
kompas.id, 11 Oktober 2022, 11 & 12 Agustus 2024; dan
Kontan, 13 Agustus 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.